



Strategi Pemerintah Kota Subulussalam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sawit

Havida Zein¹ Nurhaslita Sari²

Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat
hafidahzain@gmail.com , nurhaslita.sari@utu.ac.id

Received : Sept 7, 2022; Accepted : Oct 10, 2022
DOI 10.25299/jiap.2022.vol8(2).10470

Abstract

This study discusses how the Subulussalam city government's strategy in improving the welfare of oil palm farmers, with qualitative research methods that emphasize a descriptive approach, the study aims to examine whether the Subulussalam city government is trying or not in improving welfare and how the condition of farmers is in the situation of fluctuating FFB prices and then what obstacles are faced by the government in improving the welfare of oil palm farmers in Subulussalam city. And the results of the study indicate that the Subulussalam City Government has established policies that seek to improve the welfare of oil palm farmers in the city of Subulussalam which is currently still in a low state and needs to be improved further, while some of the policy efforts provided by the Subulussalam city government are the empowerment of farmers/planters, the program is the formation of farmer groups as a forum that accommodates various aspirations from farmers, developing human resources for oil palm farmers where the program is counseling guidance on good and right gardening, while the next effort is to increase the production of oil palm plantations as stated in the PSR program and efforts to provide facilities and infrastructure There are also several programs, namely the opening of production roads, distribution of oil palm seeds, procurement of subsidized fertilizers and other efforts to stabilize FFB prices. Subulussalam City has tried to improve the welfare of oil palm farmers in various ways.

Key Words : Strategy, City Government, Prosperous, Oil palm farmers

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi pemerintah kota Subulussalam dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit, dengan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah pemerintah kota Subulussalam berupaya atau tidak dalam meningkatkan kesejahteraan dan bagaimana keadaan petani sawit di tengah situasi naik turunnya harga TBS ini serta kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Kota Subulussalam. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Subulussalam menetapkan kebijakan yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit di kota Subulussalam yang saat ini masih dalam keadaan rendah dan perlu ditingkatkan lagi kesejahteraannya, adapun beberapa upaya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kota Subulussalam yaitu pemberdayaan petani/pekebun programnya adalah pembentukan kelompok tani yang mana sebagai wadah yang menampung berbagai aspirasi dari petani, pengembangan SDM petani sawit dimana programnya adalah penyuluhan pembinaan tentang berkebun yang baik dan benar, adapun upaya selanjutnya adalah peningkatan produksi hasil kebun sawit yang tertuang dalam program PSR dan upaya dalam penyediaan sarana dan prasarana ada beberapa program juga yaitu pembukaan jalan produksi, pembagian bibit sawit, pengadaan pupuk bersubsidi dan upaya lainnya adalah penstabilan harga TBS, Meskipun kita tahu bahwa harga TBS ini tidak dapat dikontrol oleh pemerintah daerah akan tetapi Kota Subulussalam sudah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit dengan berbagai macam cara.

Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Daerah, Kesejahteraan, Petani Sawit

Pendahuluan

Sejak awal pembangunan perekonomian peran sektor pertanian sudah tidak bisa lepas dari Indonesia karena pertanian selalu menjadi perhatian tersendiri oleh Pemerintah Indonesia karena perannya yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan serta industri dalam negeri, (Soekartawi:1993), pada dasarnya juga pembangunan pertanian juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tahapan kegiatan pembangunan pertanian dalam mewujudkan kesejahteraan petani ini sudah terlaksana atau belum, karena ini juga merupakan Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014, dan peningkatan kesejahteraan petani ini masuk kedalam salah satu dari empat target utama pembangunan pertanian (Kementan,2010), dan karena merasa bahwa banyaknya masyarakat kota Subulussalam yang bergantung hidup dengan menjadi petani, ini mendorong Pemerintah Kota Subulussalam untuk terus berupaya agar selalu meningkatkan kesejahteraan para petani sawit, terutama petani sawit swadaya, mengingat juga saat ini sawit bisa menjadi penghasilan yang menjanjikan jika para petani dapat mengolahnya dengan baik (Situmorang and Munardi 2018). Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Provinsi Aceh dengan mata pencaharian utama berada pada sektor pertanian, begitupun dengan Kota Subulussalam para penduduknya juga bergantung hidup dengan menjadi petani sawit Selain itu pertanian merupakan harapan juga dalam penyerapan tenaga kerja karena memiliki kontribusi yang sangat besar untuk perekonomian Kota Subulussalam (Domestik et al. 2021). Saat ini pengelolaan perkebunan kelapa sawit juga dipengaruhi oleh kekuatan luar, dimana

saat ini pasar dunia mempengaruhi harga TBS sehingga kesejahteraan petani sawit mulai terusik karena semakin buruk atau mundurnya pengelolaan perkebunan dan peningkatan produksi perkebunan ini mempengaruhi pada penurunan kesejahteraan petani sawit juga (Sumarti 2007)

Adapun sebelumnya akan dijelaskan sedikit tentang Pemerintahan Daerah yang tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 mengenai Pemerintahan Daerah (UU Pemda), penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Sementara itu dalam pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Kepada Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, yang mana Kota Subulussalam sendiri dipimpin oleh kepala daerah Seorang Walikota (RISWANTO, Hidayati, and Fuhaidah 2019). Tanaman kelapa sawit banyak dibudidayakan di Kota Subulussalam dengan berbagai sistem, ada yang dengan sistem perkebunan oleh perusahaan besar baik oleh perusahaan besar ataupun perusahaan pemerintah yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara maupun perusahaan milik swasta dan juga banyak juga yang ditanam oleh masyarakat secara kecil-kecilan. (Domestik et al. 2021) Tanaman kelapa sawit banyak dibudidayakan di Kota Subulussalam adalah karena dari segi lingkungan dan wilayahnya sangat memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit, kondisi lingkungan serta wilayahnya yang relative datar memudahkan pengolahan dan juga dapat menekan biaya produksi selain itu

kondisi tanahnya juga memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya akan tetapi dengan keadaan sektor pertanian sawit yang saat ini bermasalah dalam kenaikan dan penurunan harga yang tidak stabil menyebabkan kesejahteraan petani sawit sebagian besar masih dibawah rata-rata nasional. Ini juga akan menjadi kesenjangan pendapatan masyarakat yang nantinya ditakutkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin.(Syahza 2011)

Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani sawit yang ada di Kota Subulussalam yang mana kesejahteraan petani perlu diperhatikan dan penting karena merupakan tujuan pembangunan pertanian dan pembangunan nasional yang menjadi alasan setiap masyarakat untuk berjuang demi meraih kesejahteraan anggota keluarganya serta untuk dikembangkan guna meningkatkan perekonomian di Kota Subulussalam. (buku produk domestik bruto) Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang mana kesejahteraan sosial merupakan keadaan yang kondisi kehidupannya terpenuhi secara sejahtera. Demikian, kebutuhan yang dimaksudkan berupa jasmani, rohani dan sosial yang secara tidak langsung kesejahteraan juga diartikan sebagai kondisi yang terpenuhinya kebutuhan hidup, terlebih kebutuhan yang memiliki sifat mendasar atau pokok misal pakan, pangan dan papan, pendidikan serta Kesehatan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kesejahteraan dari aspek ekonomi adalah

suatu kondisi ekonomi seseorang yang masuk kategori cukup dalam memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Pada dasarnya, kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang saling berkaitan seperti taraf penghasilan, Kesehatan, Pendidikan, kemudahan akses memperoleh barang dan jasa, kondisi alam serta letak geografisnya dan lainnya. (RISWANTO, Hidayati, and Fuhaidah 2019)

Pentingnya peran sektor pertanian kelapa sawit dan perlunya memperhatikan kesejahteraan petani sawit yang ada di Kota Subulussalam, Salah satu faktor suksesnya pembangunan pertanian dalam mewujudkan kesejahteraan petani adalah peran dari pada stakeholder pertanian Pemerintah Kota Subulussalam seperti dinas pertanian, perkebunan dan perikanan dalam merancang berbagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit. yang mana strategi menurut Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steiner dan Miner (1977) seperti yang dikutip oleh Rangkuti (2005:4) strategi adalah upaya yang dilakukan baik secara terus-menerus ataupun yang dilakukan secara fleksibel dengan melihat peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan yang mampu mempengaruhi suatu organisasi. Teori ini saya pakai karna menurut saya sangat sesuai, dimana pemerintah tidak hanya sekali dua kali dalam melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan bagi petani sawit yang ada di wilayah kota Subulussalam tetapi mereka melakukannya secara terus menerus.(Marita et al. 2021) Sedangkan, Glueck dan Jauch (1998: 12) mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana atau upaya yang disusun secara menyeluruh dan sistematis yang berguna untuk menghubungkan strategi yang dibuat suatu instansi dengan tantangan

lingkungan, dan dirancang sedemikian rupa guna memastikan bahwa strategi atau upaya tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan utama dari instansi atau organisasi tersebut dengan pelaksanaan strategi yang tepat.(Usman, Hakim, and Malik 2012). Sementara Stephanie K. Marrus (2002:31) merumuskan bahwa strategi merupakan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan utama yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi yang direncanakan oleh petinggi organisasi tersebut dengan meliputi penyusunan cara atau upaya tercapainya tujuan tersebut. Berdasarkan pandangan-pandangan para ahli di atas, bisa disimpulkan bahwa definisi strategi adalah cara yang dapat menghantarkan sesuatu kepada suatu pencapaian, tujuan atau sasaran tertentu dengan menyusun perencanaan jangka panjang yang di dalamnya terdapat rangkaian tindakan atau kebijakan yang menjadikan suatu bentuk rencana yang menjadikan lebih baik (Marita et al. 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama adalah melihat apakah petani sawit di Kota Subulussalam ini sudah sejahtera atau belum, yang kedua mengkaji apa strategi pemerintah Kota Subulussalam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani sawit yang mana Pemerintah Daerah ini merupakan unsur penting yang didalamnya terdapat stakeholder yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawi, yang selanjutnya adalah mengetahui hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam upaya yang dilakukan, yang mana dengan mengenali hambatan dan kendala ini masyarakat tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah ketika para petani sawit belum merasa belum ada mencapai titik kesejahteraan.

Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti tentang strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan adalah penelitian terdahulu yang pertama oleh Ahmad Riswanto (2019) yang berjudul *Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Karet di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari*. Unit analisis dari penelitiannya adalah mengenai bagaimana pemerintah daerah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani karet di Kecamatan Batin XXIV yang didalamnya berisikan bahwa strategi dari pemerintah itu sudah ada akan tetapi untuk tingkat kesejahteraan dari petani karet tersebut masih tergolong rendah dikarenakan banyaknya masyarakat beralih tani menjadi petani sawit yang lebih menjanjikan sehingga para petani karet yang tersisa sulit untuk menjualnya, dan langkanya bibit karet sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang bagaimana strategi pemerintah Kota Subulussalam dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit yang seharusnya sawit lebih menjanjikan akan tetapi belakangan ini terjadi penurunan harga yang drastis terhadap harga jual TBS (Tandan Buah Segar) di kalangan petani mengalami penurunan harga sedangkan harga bibit, pupuk dan obat-obatan kimia serta peralatan hingga biaya pemeliharaan masih tinggi, seperti krisis ekonomi yang terjadi sejak 2018-2021 akibat perang dagang China dan Amerika Serikat yang juga berdampak dengan mewabahnya Covid-19 di berbagai negara sehingga peristiwa tersebut menyebabkan turunnya permintaan CPO oleh Negara-Negara yang menjalin mitra dagang dengan Indonesia seperti China, Timur Tengah, India dan beberapa Negara di Eropa.(Jamilah, Mawardati, and Syamni

2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti strategi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Leny Marita, Mohammad Arief, Nurita Andriani, dan Muhammad Alkirom Wildan (2021) yang berjudul *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia, Review Manajamen Strategis* yang dalam penelitian sebuah jurnal tersebut unit analisisnya adalah tentang bagaimana membangun kerangka strategi peningkatan kesejahteraan petani, dilihat melalui kondisi petani, stakeholder pertanian, strategi yang dilakukan dan ukuran kinerjanya. Yang mana dalam penelitian tersebut dijelaskan sangat banyak sekali strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang telah diteliti adalah intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi usaha, manajemen pemasaran, dan rantai pasok, manajemen resiko dan keuangan, adopsi teknologi, dan kemitraan atau kelembagaan. Dan dalam penerapan strategi ini memerlukan kinerja dari stakeholder pertanian seperti pemerintah pusat dan daerah, industri, lembaga keuangan, lembaga tani atau koperasi, dan pedagang komoditas. Untuk ukuran kinerja dari strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, perbaikan kualitas produk, kestabilan keuangan, kondisi kerja lebih baik, akses pasar lebih luas, perlindungan resiko, diferensiasi sumber penghasilan dan kelestarian lingkungan, jadi dalam penelitian ini dijabarkan secara luas tentang strategi meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia yang berupa perencanaan dan mereka secara umum menyebutkannya untuk seluruh petani tidak fokus kepada satu unit jenis petani, sedangkan dalam penelitian saya

ini saya fokus meneliti strategi Pemerintah daerahnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit yang kebetulan di Kota Subulussalam ini sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani sawit.

Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Reskika Sari (2021) dengan judul *Strategi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Menjaga Stabilitas Harga Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Di Kecamatan Batang Tuaka*, fokus penelitiannya adalah tentang strategi pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam menjaga stabilitas harga kelapa guna meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kecamatan Batang Tuaka, disini beliau melakukan penelitian ini karena 70% dari penduduk Kecamatan Batang tuaka berpenghasilan sebagai petani kelapa, dan jika dilihat dari indikator kesejahteraan menurut midgley yaitu (kehidupan sosial masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pengembangan diri masyarakat) strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjaga stabilitas harga kelapa yaitu membuat sebuah regulai berupa penetapan harga kelapa melalui PERDA No 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa, melakukan penguatan terhadap petani dengan cara melakukan pola budidaya yang baik dan yang terakhir adalah meminta kepada petani untuk melakukan kegiatan pengolahan atau divertifikasi produk, yang mana strategi ini sudah berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Batang Tuaka namun memang belum terlalu terlihat signifikan Dalam penelitian ini ruang lingkup yang disajikan lebih sempit atau fokus terhadap kesejahteraan petani kelapa dalam sebuah kecamatan, tidak jauh berbeda dengan yang saya teliti dimana fokusnya juga tentang strategi dalam meningkatkan kesejahteraan petani akan tetapi dalam

penelitian saya ini saya mencoba lebih berani mengambil ruang lingkup yang lebih luas yaitu petani sawit yang ada di Kota Subulussalam, selain itu penelitian sebelumnya mereka fokus dalam menjaga stabilitas harganya menurut saya ini mirip dengan penelitian yang akan saya teliti karena dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit juga, kestabilan harga sangat berpengaruh akan tetapi saya tidak berfokus pada penjagaan stabilitas harga kelapa sawit karena harga kelapa sawit itu tidak bisa dikontrol oleh Pemerintah Daerah, sehingga alternatif lain yang akan dituangkan dalam penelitian saya ini adalah dengan peningkatan kualitas produksi dan penyediaan sarana dan prasarana bagi petani sawit agar lebih mudah dalam bertani sawit.

Metode

Dalam mempedomani proses penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang mencakup penelitian deskriptif melalui pendekatan induktif, penulis memilih metode ini karena didalamnya akan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi sebenarnya dalam pelaksanaan penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian menafsirkannya dalam bentuk analisis dan perumusan masalah, sedangkan digunakannya pendekatan induktif karena bertumpu atau didasari berdasarkan data di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum tentang Strategi Pemerintah Kota Subulussalam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sawit. Adapun analisisnya memakai teori strategi menurut Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steiner dan Miner (1977) seperti yang dikutip oleh

Rangkuti (2005:4) strategi adalah upaya yang dilakukan baik secara terus-menerus ataupun yang dilakukan secara fleksibel dengan melihat peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan yang mampu mempengaruhi suatu organisasi.

Ada dua sumber data utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder dengan memanfaatkan hasil wawancara dan observasi sebagai sumber data utama yang berupa tindakan dan kata. Sedangkan data sekunder lebih menekankan pada literatur terkait sebagai pendukung data primer. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan beberapa informan terkait, untuk mendeskripsikan data yang diperoleh. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Asisten Perekonomian dan pembangunan Sekretariat daerah kota Subulussalam, Bagian ekonomi dan SDA dari kantor sekretariat daerah kota Subulussalam jabatan Analisis Pengembangan Potensi Daerah yang mana mereka ini merupakan unsur penting dari staf Walikota yang menangani masalah perekonomian dan pembangunan yang ada di kota Subulussalam, Kabag Bagian Perkebunan dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam (DISTANBUNKAN) dan bagian pelaksana penilai usaha perkebunan DISTANBUNKAN Kota Subulussalam dan informan selanjutnya adalah petani sawit yang terdiri dari ayah penulis dan juga beberapa tetangga penulis yang berpenghasilan dari menjadi petani sawit. Adapun data sekunder diperoleh dari *literature review*/studi kepustakaan terkait seperti buku, jurnal, artikel, hasil penelitian serta literatur lain yang memiliki informasi serupa atau berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu,

penulis juga mendapatkan data dari BPS kota Subulussalam dan data dokumen dari Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Kesejahteraan Petani Sawit Di Kota Subulussalam

Kesejahteraan ialah hal yang penting untuk diperhatikan dalam pembangunan daerah dimana jika kesejahteraan masyarakatnya mengalami perkembangan maka bisa dikatakan bahwa perekonomiannya juga berjalan dengan baik, karena pembangunan ekonomi yang berhasil adalah yang secara terus menerus dan berkelanjutan serta merata dirasakan oleh masyarakat.(Domestik et al. 2021). Petani sawit memiliki titik fokus tersendiri dari pemerintah karena Kota Subulussalam merupakan daerah yang sebagian besar wilayah nya menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan hal ini pulalah yang mendorong masyarakatnya untuk berproduksi atau bekerja sebagai petani meskipun dalam beberapa bulan terakhir ini terkadang tidak stabil dan ini sangat berpengaruh pada pendapat masyarakatnya, Akhir-akhir ini harga kelapa sawit bisa saja tiba-tiba turun secara drastis sedangkan harga pemeliharaannya masih harga tetap, seperti harga pupuk dan pestisida serta biaya dalam pengerjaan atau perawatan usaha tani sawit ini yang pada umumnya menggunakan sistem upah kepada orang lain walaupun tidak sedikit juga yang mengerjakan sendiri.(Syahza and

Khaswraina 2007), Adapun hasil penelitian ini fokus kepada strategi Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit yang mana jika dalam penelitian terdahulu mereka meneliti tentang strategi pemerintah daerahnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet, lalu hasil penelitian terdahulu yang kedua adalah tentang bagaimana membangun kerangka strategi peningkatan kesejahteraan petani, dilihat melalui kondisi petani, stakeholder pertanian, strategi yang dilakukan dan ukuran kinerjanya. Yang mana dalam penelitian tersebut dijelaskan sangat banyak sekali strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang telah diteliti adalah intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi usaha, manajemen pemasaran, dan rantai pasok, manajemen resiko dan keuangan, adopsi teknologi, dan kemitraan atau kelembagaan. Dan dalam penerapan strategi ini memerlukan kinerja dari stakeholder pertanian seperti pemerintah pusat dan daerah, industri, lembaga keuangan, lembaga tani atau koperasi, dan pedagang komoditas. Untuk ukuran kinerja dari strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, perbaikan kualitas produk, kestabilan keuangan, kondisi kerja lebih baik, akses pasar lebih luas, perlindungan resiko, diferensiasi sumber penghasilan dan kelestarian lingkungan jadi dalam penelitian ini disebutkan strategi meningkatkan kesejahteraan petani secara umum, akan tetapi dalam penelitian ini penulis memfokuskan petani sawit yang ada di Kota Subulussalam dan untuk

penelitian yang ketiga adalah tentang meningkatkan kesejahteraan petani sawit dengan menjaga stabilitas harga sawit, akan tetapi dalam penelitian ini penulis ingin menjabarkan secara lebih luas tentang strategi Pemerintah Kota Subulussalam yang memiliki luas 1.391 km² ini sebagian wilayahnya ditanami kelapa sawit, Kota Subulussalam dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit mulai dari peningkatan hasil produksi, penstabilan harga, penyuluhan, hingga pembentukan kelompok tani sebagai wadah aspirasi bagi petani sawit. Kota Subulussalam yang memiliki luas 1.391 km² ini sebagian wilayahnya ditanami kelapa sawit,

Tabel 1

Luas areal lahan dan produksi sawit di Kota Subulussalam menurut kecamatan Tahun 2019-2020

Tahun	Kecamatan (subdistrik)										Kota	
	Simpang kiri		Penanggalan		Rundeng		Sultan daulat		Longkib		Subulussalam	
	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton
2019	3.104	9.450	1.697	5.401	2.516	7.172	1.809	6.255	2.752	6.850	11.878	35.128
2020	2.984	9.450	1.634	5.400	2.440	7.320	1.809	5.706	2.662	7.853	11.529	35.729

Sumber : Subulussalam dalam angka 2022

Perlahan tapi pasti tanaman kelapa sawit dari tahun ke tahun selalu menjadi unggulan yang dibudidayakan oleh masyarakat Kota Subulussalam dimana perkembangannya sejak akhir 2021 hingga awal 2022 ini mengalami pasang surut perbaikan dimana pemerintah terus mengupayakan kestabilan harga agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Kota Subulussalam terdapat 5 Kecamatan dengan sebaran lahan sawit yang paling luas ialah Kecamatan Simpang kiri dengan luas lahan 3.104, kemudian disusul Kecamatan Longkib dengan luas lahan 2.752 , kemudian Kecamatan Rundeng dengan luas lahan 2.516, lalu Kecamatan Sultan Dulat dengan luas lahan 1.809 dan yang terakhir adalah Kecamatan Penanggalan dengan

luas lahan 1.697. Adapun untuk hasil produksinya yang mengalami peningkatan adalah Kecamatan Longkib yang pada 2019 sebanyak 6.850 ton meningkat pada tahun 2020 menjadi 7.853 ton dan Kecamatan Rundeng yang pada 2019 sebanyak 7.172 ton pada 2020 meningkat menjadi sebanyak 7.320 ton.(Badan Pusat Statistik 2022)

Pemerintah Kota Subulussalam memberikan program dan kebijakan yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit yang diharapkan bisa memperbaiki kondisi sosial ekonomi para petanisawit. Evaluasi terhadap program dan kebijakan pemerintah yang dilakukan adalah dengan melihat indikator kesejahteraan rakyat yang apabila indikator tersebut meningkat maka kita dapat berasumsi bahwa kinerja program dan kebijakan yang ditetapkan sudah mencapai sasaran yang tepat dan merata dan sebaliknya,(indikator kesejahteraan rakyat kota subulussalam 2021) Adapun indikator kesejahteraan petani Menurut Dinas Pertanian, Perkebunandan perikanan Kota Subulussalam adalah harga,biaya produktivitas dan hasil produksi dimana seperti yang kita ketahui saat ini harga sawit pada akhir-akhir ini terus mengalami penurunan harga yang sangat drastis dengan hasil produksi yang juga saat ini menurun juga sangat mempengaruhi apalagi biaya produktivitas dan pemeliharaan saat ini juga tidak bisa diturunkan karena biasanya petani swadaya akan mempekerjakan orang untuk mengurus lahan sawitnya dengan cara memberiupah, dan berdasarkan hasil diskusi penulis dengan Asisten II, Pak Rudyanto sebagai petani swadaya, Bagian Ekonomi Setdako menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraannya masih belum sejahtera karena meskipun sudah

dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai program jangka panjang agar kedepannya hasil produksi meningkat tetap saja belum terbilang sejahtera karena saat ini hasil kebun yang sedang sedikit, harga jual rendah sertabiaya pemeliharaan yang tidak bisa diturunkan lagi dimana harga TBS ini tidak bisa dikontrol oleh pemerintah daerah.

Berikut merupakan presentase harga TBS pada bulan Juni lalu

Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Aceh

1. Rata-rata harga CPO =Rp.12,449,91
2. Rata-rata harga kernel=Rp. 8,228.44
3. Indeks "K" = 83,49 %

Tabel 2
Harga TBS wilayah Barat Aceh menurut
DISTANBUNKAN aceh

Umur Tanaman	R-CPO	R-Is	Dibulatkan (Rp)	Bulan lalu
3 Tahun	14.49%	3.78%	1.797	1.733
4 Tahun	17.06%	4.52%	2.120	2.045
5 Tahun	18.41%	4.64%	2.271	2.190
6 Tahun	19.41%	4.87%	2.393	2.308
7 Tahun	20.21%	4.94%	2.483	2.394
8 Tahun	20.54%	4.96%	2.519	2.429
9 Tahun	20.74%	5.03%	2.545	2.454
10-20 Tahun	21.30%	5.15%	2,613	2.519
21 Tahun	20.83%	5.06%	2.557	2.465
22 Tahun	20.53%	5.00%	2.521	2.430
23 Tahun	20.40%	5.00%	2.507	2.417
24 Tahun	20.14%	4.97%	2.478	2.389
25 Tahun	19.78%	4.96%	2.439	2.352

Sumber : website resmi DISTANBUNKAN Kota Subulussalam

Strategi Pemerintah Kota Subulussalam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sawit

Pemberdayaan Petani/pekebun

Upaya yang paling dasar dilakukan oleh Pemerintah adalah pemberdayaan petani/pekebun untuk

programnya adalah membentuk kelompok tani, dimana kelompok tani ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung berbagai aspirasi dari para petani sawit swadaya yang ada di tingkat desa, kelompok tani ini bertujuan juga memudahkan untuk melihat peningkatan serta perkembangan dalam membantu petani swadaya agar lebih cepat dan mudah untuk penyaluran bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, jadi jangan salahkan siapapun ketika kita tidak dapat bantuan berupa pupuk subsidi, replanting atau sebagainya karena pertanyaannya apakah orang tersebut masuk dalam kelompok tani? selain tempat penyaluran bantuan, dalam kelompok tani ini para petani diharapkan mampu menjalin hubungan kekerabatan baik dengan perusahaan dan saling membantu serta saling berbagi informasi terkait kepentingan serta tujuan bersama dalam meningkatkan hasil produksi dan pendapatan para petaninya.

Pengembangan SDM Petani sawit

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam ada juga pengembangan SDM petani sawit yang mana programnya adalah penyuluhan atau pembinaan bagi para petani sawit bagaimana berkebun yang benar mulai dari penanaman, pemeliharaan hingga memanen sawit yang benar agar tidak memanen buah mentah, menurut hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan bagian perkebunan di DISTANBUNKAN Kota Subulussalam mengatakan bahwa penyuluhan pembinaan ini sudah pernah dilaksanakan di 5 Kecamatan di Kota Subulussalam dengan cara disampaikan oleh penyuluh yang telah terpilih kepada petani sawit perwakilan dari 5 Kecamatan tersebut lalu perwakilan dari 5 Kecamatan ini lah yang

nantinya menyampaikan kepada seluruh petani sawit dari asal Kecamatan mereka.

Gambar 1
Dokumentasi kegiatan penyuluhan pembinaan petani sawit



Sumber : website resmi DISTANBUNKAN Kota Subulussalam

Peningkatan Produksi Hasil Kebun Petani

Peningkatan produksi hasil kebun petani ini salah satu programnya adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini bertujuan untuk membantu para petani sawit memperbaharui perkebunan sawit mereka agar lebih berkualitas kedepannya karena saat ini di wilayah Kota Subulussalam ini perkebunan sawit rakyatnya sudah banyak yang tua, rusak dan tidak produktif lagi dan sebagian ada juga yang menanam sawit dengan bibit yang tidak unggul. Adapun penyaluran dana PSR ini berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang didasarkan dari Perpres No. 61/2015 jo. dan Perpres No. 66/2018 yang diantaranya adalah untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit. Untuk di Kota Subulussalam sendiri melalui wawancara dengan bagian Perkebunan DISTANBUNKAN Kota Subulussalam sendiri menyebutkan bahwa program ini

sudah berjalan di sebagian dari 5 Kecamatan yang ada di Kota Subulussalam sejak 2019 dan saat ini masih terus dilanjutkan.

Gambar 2
Kegiatan program Peremajaan Sawit Rakyat



Sumber : Dokumentasi DISTANBUNKAN Kota Subulussalam

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan

Penyediaan sarana dan prasarana ini merupakan suatu upaya dari Pemerintah Kota Subulussalam yang mana programnya berupa pembukaan jalan produksi berdasarkan wawancara penulis dengan bagian perkebunan DISTANBUNKAN Kota Subulussalam menyatakan bahwa program ini menggunakan dana dari BPDPKS dan APBK yang sebagaimana diamanatkan pada pasal 93 Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan telah berjalan sampai sekarang, pembukaan jalan produksi ini bertujuan untuk memudahkan jalan petani sawit yang sebelumnya terlalu jauh masuk kedalam dan aksesnya sulit dijangkau oleh mobil pengangkut hasil produksi buah TBS.

Program lainnya dari penyediaan sarana dan prasarana ini adalah Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan bagian perkebunan di DISTANBUNKAN Kota Subulussalam menyebutkan bahwa sudah ada

pembagian bibit sawit kepada petani sawit, yang mana pemberian bibit sawit ini bertujuan agar para petani menanam sawit dengan bibit yang legal dan pasti bagus untuk kedepannya karena hasil produksi dari bibit sawit yang tidak legal sangat mempengaruhi kualitas produksi CPO yang dihasilkan, untuk anggaran dana pembagian bibit sawit ini sendiri berasal dari APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) disalurkan kepada petani sawit yang terdaftar dalam kelompok tani.

Gambar 3
Pembagian bibit sawit



Sumber : Dokumentasi DISTANBUNKAN Kota Subulussalam

Adapun pengadaan pupuk bersubsidi juga termasuk kedalam kategori penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, akhir-akhir ini dengan harga pupuk yang relatif tinggi ini tentu sangat menjadi masalah penting bagi para petani, terlebih saat ini harga sawit yang tidak stabil juga sangat membuat para petani sawit merasa keberatan, pupuk merupakan nutrisi bagi tanaman agar

subur, mendapatkan hasil yang baik dan melimpah serta terhindar dari virus serta hama. Pengadaan pupuk bersubsidi sendiri dari hasil penelitian melalui wawancara dengan Pak Rudyanto sebagai petani sawit swadaya mengatakan sudah ada sejak lama dan sampai sekarang masih berjalan, adapun sumber anggarannya adalah APBA Prov.Aceh.

Penstabilan Harga

Adapun upaya yang paling menonjol dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam ini adalah mereka terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga sawit, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya akhir-akhir ini sawit memiliki harga yang naik turun sejak dari larangan ekspor CPO yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Jokowi yang mana sejak 28 April 2022 Pemerintah melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) setelah itu harga tandan buah sawit jatuh akan tetapi kebijakan ini dicabut pada 23 Mei 2022 dengan alasan bahwa pasokan minyak goreng di dalam negeri sudah melimpah dari yang sebelumnya hanya 64,5 ribu ton perbulan menjadi 211 ribu ton. Namun, sebelum ada kebijakan tentang larangan ekspor CPO ini Pemerintah Daerah Kota Subulussalam melalui tim monitoring dan evaluasi penerapan penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun dan fasilitasi tanggung jawab sosial perusahaan/ corporate social responsibility (CSR) pada tanggal 10 Februari melakukan rapat penetapan harga sawit yang diadakan oleh Distanbun Aceh, diadakan di aula Setda Kota Subulussalam dan dibuka oleh Wakil Walikota Subulussalam dihadiri oleh, Asisten I dan II Setda Kota Subulussalam, Biro Ekonomi Setda Aceh, GABKI, Apkasindo Aceh, Apkasindo Perjuangan, Tim Ahli Distanbun Aceh, Dinas Kab/Kota

yang membidangi Perkebunan dan perwakilan perusahaan PKS dari seluruh wilayah barat dan timur Aceh.

Adapun tujuan dari acara ini adalah bagi PKS (Pabrik kelapa sawit) agar menjadi acuan dalam pembelian/penjualan TBS petani dengan perusahaan, menghindari persaingan harga yang tidak sehat antar pabrik kelapa sawit, serta mendorong/memfasilitasi kemitraan perusahaan dengan kelembagaan pekebun. Dan pada tanggal 20-22 Mei 2022 Pemerintah Daerah Kota Subulussalam yang terdiri dari Wakil Walikota, Sekda, Asisten II, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, dan Ketua APKASINDO melakukan sidak ke PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) untuk memastikan hasil Rapat Penetapan dan Pemantauan Harga TBS agar dipatuhi, Disini kita bisa melihat sebenarnya dari Pemerintah Daerah Kota Subulussalam sendiri tidak main-main dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Gambar 4

Wakil Walikota, Sekda, Asisten II, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, dan Ketua APKASINDO melakukan sidak ke PMKS



Sumber : Dokumentasi pribadi

Hambatan serta kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Subulussalam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani sawit

Dari berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam sebenarnya sudah cukup banyak dan tidak kekurangan ide, namun apalah daya terkadang ada juga beberapa kelompok yang acuh dan mementingkan diri sendiri, ketika Pemerintah telah melakukan berbagai upaya tapi terkadang ada oknum yang ingin memperkaya diri sendiri, dari berbagai strategi yang telah dijelaskan oleh penulis berdasarkan data serta wawancara ada juga berbagai hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Subulussalam yaitu:

Anggaran Dana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Lidin selaku Asisten II Setdako Subulussalam menyatakan bahwa dari berbagai upaya atau kebijakan yang telah disebutkan diatas yang menjadi kendalanya adalah anggaran dana, dimana terkadang untuk programnya baik dari DISTANBUNKAN, Asisten II (Perekonomian dan pembangunan), Bagian Ekonomi Setdako Subulussalam sudah sinkron sangat siap menjalankan program tersebut tetapi terkendala pada anggaran dananya, terkadang dana yang tidak kunjung cari atau cair akan tetapi tidak sesuai dengan yang sebelumnya diharapkan.

Minimnya Tingkat Kesadaran Petani Dalam Mengikuti Penyuluhan

Untuk mendorong kesadaran petani sawit, petani juga perlu untuk dapat menciptakan dan menjalankan pola pertanian yang dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawi, (Mikhael 2015), Pemerintah Kota Subulussalam berupaya

memberikan kebijakan berupa penyuluhan tentang berbagai pengetahuan kepada petani akan tetapi berdasarkan hasil penelitian saya melalui wawancara dengan Pak Lidin selaku Asisten II Setdako Subulussalam menyatakan bahwa banyak dari petani yang merasa tidak penting atau beranggapan sepele jika ada penyuluhan tentang pertanian, namun pada kenyataannya mereka ada juga yang tidak paham, mereka seringkali memanen sawit dengan kualitas yang buruk seperti buah mentah, buah lewat matang, janjang kosong dan buah busuk, serta buah abnormal. Selain itu, para petani juga masih banyak yang menanam sawit dengan bibit yang tidak jelas dari mana, kualitas buahnya kedepannya seperti apa dari data hasil wawancara saya dengan bagian perekonomian Setdako Subulussalam mengatakan banyak dari petani yang menanam sawit dengan bibit yang didapat dari buah kelapa sawit yang berjatuhan dan tumbuh di sembarang tempat, padahal untuk bibit sawit yang layak ditanam sudah ada dijual dengan legal dipasaran dengan harga yang telah ditentukan, dari bibit sawit yang sembarangan ini, memanen sawit yang mentah, buah lewat matang, janjang kosong dan buah busuk ini dapat mengakibatkan rendahnya nilai rendemen pada kelapa sawit.

Kurangnya Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Bantuan pupuk bersubsidi bagi petani swadaya yang ada di Daerah Kota Subulussalam ini sangat minim dan turun selama dua bulan sekali, meskipun cukup membantu akan tetapi menurut petani masih belum stabil berdasarkan wawancara penulis dengan Pak Rudiyanto sebagai ketua kelompok tani dari Desa Makmur Jaya (salah satu desa di

Kota Subulussalam) menyatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi ini disalurkan kepada kelompok tani lalu para petani membelinya dengan harga yang lebih rendah. Kurangnya penyaluran pupuk bersubsidi ini sangat terlihat sejak bulan Februari, dimana sebelumnya pupuk yang turun dalam satu kelompok tani sebelumnya mencapai 50 sampai 60 sak, untuk jenis Urea bisa sampai 30 sak, Poska 15 sak, dan SP 36 sebanyak 15 sak akan tetapi sekarang hanya turun 20 sak dalam satu kelompok tani, ini jumlah yang sangat menyedihkan, sudah tidak bisa dibagi secara merata lagi, selain itu pupuk bersubsidi ini juga turunnya tidak tentu terkadang ketika petani memiliki uang lebih pupuk tidak turun, tetapi ketika uang petani sudah tidak tersisa pupuk baru turun.

Harga yang tidak Stabil

Dibalik upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menstabilkan harga TBS, banyak sekali kendala yang dihadapi oleh Pemerintah juga salah satunya adalah, meskipun sudah adanya penetapan harga sawit yang sebelumnya telah dirapatkan mereka terkadang menurunkan harga sawit secara sepihak, seperti yang baru-baru ini terjadi, pada tanggal 20-22 Mei 2022 Pemerintah Daerah Kota Subulussalam yang terdiri dari Wakil Walikota, Sekda, Asisten II, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, dan Ketua APKASINDO melakukan sidak ke PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) untuk memastikan hasil Rapat Penetapan dan Pemantauan Harga TBS agar dipatuhi, akan tetapi sampai tanggal 25 Juni ini harga TBS kelapa sawit masih terus mengalami penurunan harga yang mana menurut hasil sidak tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan Pak Husen yang merupakan staf bagian Ekonomi Setdako Subulussalam menyebutkan

alasan PMKS di Kota Subulussalam menurunkan harga karena keterbatasan daya penyimpanan atau sewa tangki penyimpanan, Selain itu harga TBS ini juga tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah Daerah karena meskipun Indonesia Indonesia merupakan produsen kelapa sawit mentah (crude palm oil atau CPO) terbesar di dunia. Namun, Indonesia belum dapat mengatur harga sawit CPO termasuk minyak goreng (migor).Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan berdasarkan data Council of Palm Oil Producing Countries (CPOC), industri nasional memasok sekitar setengah dari konsumsi CPO dunia. Namun, tingkat konsumsi CPO di dalam negeri hanya mencapai 35%. Kondisi ini yang membuat Indonesia takbisa mengendalikan harga TBS dimana produksi sawit Indonesia mencapai 43,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61 persen per tahun. Hal ini membuat CPO jadi penyumbang devisa ekspor terbesar bagi dunia akan tetapi sampai saat ini Malaysia masih menjadi juru kunci dan belum tergantikan dalam menentukan harga komoditasawit danCPOdunia Malaysia menjadi negara yang menentukan harga CPO adalah karena riwayat negara tersebut sudah pernah tercatat dan diakui sebagai produsen sawit dan CPO terbesar di dunia dalam jangka waktu yang cukup lama. Malaysia mentukan harga komoditasawit dan CPO dunia, termasuk untuk Indonesia melalui Bursa Malaysia Derivatives (BMD). BMD sendiri sudah memiliki riwayat dalam perdagangan CPO sejak1980. Keberadaan serta peran dari BMD menyebabkan harga CPO dunia salah satunya ditetapkan dan mengacu kepada mata uang ringgit Malaysia. Selain itu harga komoditasawit dan CPO juga

ditentukan oleh dollar Amerika Serikat.(Syahril 2019)

Memasuki bulan Juni ini harga sawit terus mengalami penurunan seperti tidak terkontrol, terlebih juga harga bahan pangan juga naik sehingga ini menjadi kondisi yang sangat memprihatinkan bagi petani sawit, selain itu harga yang diterima oleh petani kenapa sangat murah karena rantai suply penjualan dari petani ke pabrik cukup panjang yaitu dari petani, tengkulak/toke, pemegang surat pencairan lalu kemudian pabrik, oleh karena itu upaya yang mampu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan petani sawit adalah sebatas upaya dalam peningkatan kualitas produksi saja.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkat kesejahteraan petani sawit berdasarkan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan terdapat beberapa upaya yaitu pemberdayaan petani/pekebun programnya adalah pembentukan kelompok tani yang mana sebagai wadah yang menampung berbagai aspirasi dari petani, pengembangan SDM petani sawit dimana programnya adalah penyuluhan pembinaan tentang berkebun yang baik dan benar, adapun upaya selanjutnya adalah peningkatan produksihasil kebun sawit yang tertuang dalam program PSR dan upaya dalam penyediaan sarana dan prasarana ada beberapa program juga yaitu pembukaan jalan produksi, pembagian bibit sawit, pengadaan pupuk bersubsidi dan upaya lainnya adalah penstabilan harga TBS.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Subulussalam ini dalam upaya

peningkatan kesejahteraan petani sawit ini adalah yang pertama masalah anggaran yang terkadang turun tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran dan jumlah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan, minimnya tingkat kesadaran petani dalam mengikuti penyuluhan pembinaan tentang perkebunan sawit, kurangnya penyaluran pupuk bersubsidi dan harga TBS yang tidak stabil yang mana tidak sesuai dengan hasil produksi yang sedikit serta biaya pemeliharaan yang mahal selain itu, untuk harga TBS itu sendiri Pemerintah Daerah sebenarnya tidak dapat mengendalikannya secara keseluruhan tetapi hanya bisa memberikan upaya untuk meningkatkan hasil produksi serta mengurangi biaya produksi saja.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis ingin menyisipkan sedikit saran yaitu:

Untuk lebih terlibat dalam beberapa program pemulihan atau peremajaan sawit rakyat, agar bisa memantau sehingga petani tidak mendapatkan bibit sawit yang tidak legal atau tidak bersertifikat karena ini merupakan program penting berkelanjutan kedepannya, agar petani sawit yang ada di wilayah Kota Subulussalam ini dapat ikut bersaing di era persaingan ekonomi yang ketat ini.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2022. "Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam Bps-Statistics Of Subulussalam Municipality."
- Domestik, Produk, Regional Bruto, Kota Subulussalam, and Menurut Pengeluaran. 2021. "2017- 2021."
- Jamilah, Jamilah, Mawardati Mawardati, and Ghazali Syamni. 2022. "Kontribusi Usahatani Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumahtangga Petani Di Kabupaten Aceh Utara." *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 8(1): 387.
- Marita, Leny, Mohammad Arief, Nurita Andriani, and Muhammad Alkirom Wildan. 2021. "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia, Review Manajemen Strategis." *Agriekonomika* 10(1): 1-18.
- Mikhael, Wurangian. 2015. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Politik* 2(6): 1-12. <https://media.neliti.com/media/publications/1069-ID-strategi-pemerintah-desadalam-pemberdayaan-masyarakat-1-studi-bagi-masyarakat-p.pdf>.
- RISWANTO, S I P AHMAD, R Hidayati, and U Fuhaidah. 2019. "Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Karet Di Kecamatan Batin Xxiv Kabupaten Batang Hari." [http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/2045%0Ahttp://repository.uinjambi.ac.id/2045/1/NIM_SIP.151903_AHMAD_RISWANTO_MANAJEMEN_PEMERINTAHAN - winaramico.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/2045%0Ahttp://repository.uinjambi.ac.id/2045/1/NIM_SIP.151903_AHMAD_RISWANTO_MANAJEMEN_PEMERINTAHAN-winaramico.pdf).
- Situmorang, Diana, and Munardi Munardi. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Petani Sawit Di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil." *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal* 1(1): 23.
- Sumarti, Titik. 2007. "Kemiskinan Petani Dan Strategi Nafkah Ganda Rumahtangga Pedesaan." *Sodality:*

- Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1(2): 217–32.
- Syahril, Irmayani. 2019. "Analisis Mengatasi Penurunan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Petani Swadaya Di Indonesia." *Jurnal Ekombis* 5(1): 20–26.
- Syahza, Almasdi. 2011. "Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit *." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 12(2): 297.
- Syahza, Almasdi, and Shoera Khaswraina. 2007. "Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Kesejahteraan Petani Di Daerah Riau." *Jurnal Sorot* 1(2): 1–10.
- "Tp S: Am Ko Ta Id Ub Ul Us INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM 2021 Tp S : Ul m Ta."
- Usman, Usman, Lukman Hakim, and Ihyani Malik. 2012. "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kabupaten Bantaeng." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2(2): 191–200.